

SOSIALISASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI KHUSUSNYA PPH PASAL 21 DI RT. 008 RW. 001, SUKABUMI UTARA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT

**Alaidin Rapani, S.E., M.M.¹, Stephanus Zaldy Gunawan , S.T., M.Eng.Sc²
Wardhani Indah Sari, S.E., Ak., M.M., CA., CPAI³, Syahnan Phalipi, S.E. M.M⁴,
Jul Hendrawan, S.E., M.M.⁵**
^{1,2,3,4,5} Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia

Korespondensi: alaidin@stiebi.ac.id

ABSTRAK.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi Pajak Penghasilan orang pribadi khususnya PPh pasal 21 di wilayah RT. 008 RW. 001, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat). Dalam kegiatan ini, digunakan metode berupa penyuluhan, pelatihan, dan konsultasi dimana para peserta diberikan paparan materi berupa pemahaman tentang arti pentingnya Pajak, undang-undang perpajakan yang berlaku, dan contoh kasus yang berkaitan dengan pajak penghasilan orang pribadi khususnya PPh pasal 21, dan konsultasi tentang tata cara perhitungan dan pelaporannya. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, Kampus, dan pemerintah dalam mensosialisasikan pajak kepada Masyarakat.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi.

ABSTRACT.

This Community Service (PKM) aims to provide socialization on personal income tax, especially PPh article 21 in RT areas. 008 RW. 001, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat). In this activity, methods are used in the form of counseling, training, and consultation where participants are given material exposure in the form of an understanding of the importance of taxes, applicable tax laws, and examples of cases related to personal income tax, especially PPh article 21, and consultations. regarding the procedures for calculation and reporting. This activity provides benefits for the community, campus and government in socializing taxes to the community.

Keywords: Tax, Income Tax,

PENDAHULUAN.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh karyawan, bukan karyawan, mantan karyawan, penerima pesangon dan lain sebagainya.

Dasar Hukum

- a. Undang Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, tentang perubahan keempat atas undang undang no 7 tentang Pajak Penghasilan;
- b. Undang undang no 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan;
- c. PP no 68 tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus;
- d. PP no 41 tahun 2016 tentang perlakuan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu;
- e. Peraturan Menteri Keuangan no. 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.
- f. Peraturan Menteri Keuangan no. 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
- g. Peraturan menteri keuangan no 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara PNS, anggota TNI Anggota POLRI, dan atas penghasilan yang menjadi beban anggapan pendapatan dan belanja negara atau anggaran dan pendapatan belanja daerah.
- h. Peraturan Menteri Keuangan no. 101/PMK.10/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak
- i. Peraturan Menteri Keuangan no. 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari karyawan harian dan mingguan serta karyawan tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan;

- j. Peraturan Menteri Keuangan no 40/PMK.03/2017 tentang tata cara pelaporan dan penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan
- k. dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu;
- l. Peraturan Menteri Keuangan no 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyebaran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Keuangan no. 59/PMK.03/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan no 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan, pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyebaran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah;
- n. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-22/PJ/2009 tentang pelaksanaan pemberian pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu;
- o. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-26/PJ/2009 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-22/PJ/2009 tentang pelaksanaan pemberian pajak penghasilan pasal 21 Ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu;
- p. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

RUMUSAN MASALAH.

Rumusan Masalah berdasarkan pemahaman masyarakat terhadap Pph21 (pajak penghasilan) yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apakah masyarakat di wilayah RT. 008 RW. 001, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat memahami tentang pajak secara umum .

2. Apakah Masyarakat di wilayah RT. 008 RW. 001, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengenal pengertian dan objek Pajak Penghasilan Pasal 21..
3. Apakah masyarakat di wilayah RT. 008 RW. 001, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengetahui Aplikasi untuk perhitungan PPh Pasal 21.
4. Apakah masyarakat di wilayah RT. 008 RW. 001, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengetahui cara perhitungan PPh 21 di Online Pajak
5. Apakah masyarakat di wilayah RT. 008 RW. 001, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengetahui cara perhitungan PPh 21 di Online Pajak

KAJIAN PUSTAKA.

Metode.

Pelatihan yang kami lakukan pada saat melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Jalan Assofa Raya No. 3 RT 008 RW 001 Sukabumi Utara Kebun Jeruk Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dilakukan kombinasi antara penyuluhan, diskusi dan Tanya jawab. Diskusi serta tanya jawab mengambil waktu yang tersedia, dengan tujuan agar kegiatan berjalan lebih hidup dan tidak membosankan yang disebabkan peserta aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang kami lakukan. Hal ini juga lebih mempermudah upaya memahami materi yang kami sampaikan, karena materi yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang menjadi masalah bagi mereka. Pada kegiatan pelatihan dan pendamping yang kami lakukan ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Sosialisasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Khususnya PPh pasal 21.

Subyek / Profil Peserta.

Peserta dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah masyarakat wilayah RT 008 RW 001 Sukabumi Utara Kebun Jeruk Jakarta Barat, peserta yang hadir pada saat itu kurang lebih 50 peserta.

Pelaksanaan.

Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat (PKM) yang kami lakukan bersifat monodisiplin. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dikategorikan menjadi 2 kegiatan: yaitu Pra-pelaksana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan yang dirinci sebagai berikut:

Pra-Pelaksanaan

Kegiatan pra pelaksanaan dimulai dengan survei pendahuluan, dilanjutkan dengan pengumpulan data sasaran kegiatan dan penelitian kepustakaan.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN		
		Mei 2024	Juni 2023	Agust 2024
1	Survei Pendahuluan			
2	Pengumpulan Data Sasaran Kegiatan			
3	Penelitian Kepustakaan			
4	Pelaksanaan Kegiatan			
5	Pembuatan Laporan			

Pelaksanaan Kegiatan.

PKM ini diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2024, bertempat di RT 008 RW 001 Sukabumi Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem berupa penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini sangat bermanfaat bagi Masyarakat, yang ditunjukkan dengan respon positif yang diperlihatkan oleh para peserta pelatihan pada saat kegiatan dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

1. Sekilas Tentang PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21)

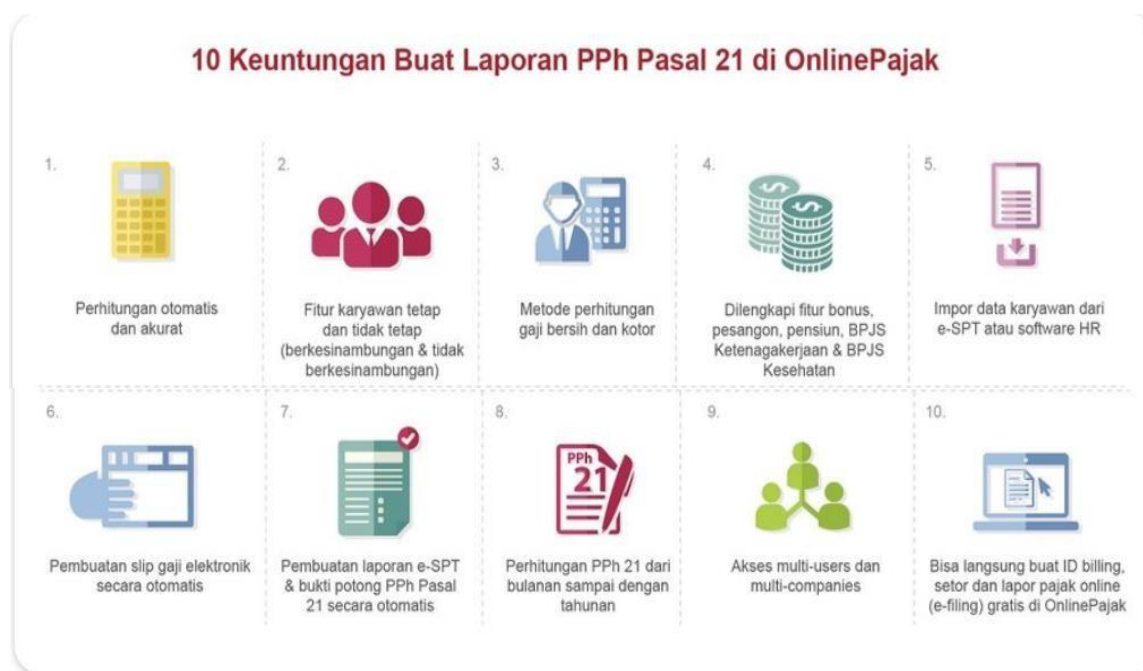
Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pengertian PPh Pasal 21 ini diambil berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

Berikut ketentuan seputar PPh 21 yang sudah diperbarui dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai kenaikan tarif Penghasilan Tidak

Kena Pajak atau PTKP terbaru (PTKP 2016) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.



Manfaat aplikasi PPh Pasal 21 OnlinePajak

Aplikasi PPh 21.

Untuk perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, biasanya akuntan atau staf payroll menggunakan excel, lalu membuat laporan SPT PPh 21 dengan software e-SPT dari DJP. Namun cara ini sungguh memakan waktu dan tidak efisien. Kini telah hadir sebuah aplikasi PPh 21 Online Pajak yang memungkinkan Anda tidak perlu hitung manual gaji, PPh Pasal 21 dan BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan dengan excel lagi. Aplikasi PPh 21 Online Pajak sudah disahkan oleh DJP sebagai aplikasi alternatif resmi penyedia e-SPT dan e-filing secara gratis dengan Surat Keputusan Nomor KEP- 193/PJ/2015.

Berikut ini adalah kelebihan-kelebihan menggunakan aplikasi PPh Pasal 21 Online Pajak:

- a. Perhitungan otomatis dan akurat. Perhitungan PPh 21 di Online Pajak selalu disesuaikan dengan peraturan pajak terbaru (termasuk peraturan tentang PTKP terbaru / PTKP 2016) dan tarif dasar progresif. Tinggal masukan saja data gaji karyawan, dalam satu klik
- b. Buat ID Billing, setor pajak online dan e-Filing PPh 21 gratis dalam 1 aplikasi. Buat ID

Billing, setor online dengan fitur BNI dan CIMB Niaga, serta e-Filing PPh 21 Anda dalam satu aplikasi terpadu, tanpa perlu datang dan antri di KPP dan dapatkan bukti e-Filing elektronik (NTTE) Anda.

- c. Update otomatis. Setiap kali ada perubahan peraturan PPh 21 dan PTKP, karena berbasis online, kami akan memperbarui aplikasi secara otomatis tanpa perlu instalasi ulang. Termasuk pula setiap kali ada pergantian tahun pajak baru, kami akan memindahkan data dari tahun pajak sebelumnya ke tahun pajak baru secara otomatis.
- d. Slip gaji elektronik 1 klik. Buat slip gaji elektronik secara otomatis begitu Anda selesai membuat laporan PPh 21. Hemat waktu dan kertas. Tinggal kirim file PDF slip gaji ke email karyawan-karyawan Anda dalam satu klik!
- e. Sistem payroll 1 klik. Bayar gaji karyawan dengan 1 klik, tanpa perlu hitung menggunakan macam-macam aplikasi dan input data berulang kali. Lebih mudah dan cepat!
- f. Cukup sekali masukkan data. Tak perlu input data yang sama berulang kali, dengan fitur impor data dari formulir e-SPT A1 dan file CSV; fitur impor data dengan template OnlinePajak yang memungkinkan Anda memindahkan data gaji karyawan secara lengkap dan/atau impor data dari software HR Anda ke aplikasi PPh 21 OnlinePajak dapat dilakukan secara mudah dan otomatis.
- g. Perhitungan PPh 21 bulanan sampai tahunan. Kapan pun awal periode kontrak karyawan, perubahan gaji karyawan atau membuat perhitungan PPh 21 tahunan, aplikasi PPh 21 OnlinePajak dapat membuat perhitungannya secara otomatis dan akurat.
- h. Pantau pengeluaran pajak & gaji karyawan dengan mudah. Undang kolega-kolega di kantor-kantor cabang mana pun secara tak terbatas untuk menggunakan Online Pajak dari mana saja dan kapan saja.
- i. Buat ID Billing, setor pajak online dan e-Filing PPh 21 gratis dalam 1 aplikasi. Buat ID Billing, setor online dengan fitur BNI dan CIMB Niaga, serta e-Filing PPh 21 Anda dalam satu aplikasi terpadu, tanpa perlu datang dan antri di KPP dan dapatkan bukti e-Filing elektronik (NTTE) Anda.
- j. Update otomatis. Setiap kali ada perubahan peraturan PPh 21 dan PTKP, karena berbasis online, kami akan memperbarui aplikasi secara otomatis tanpa perlu instalasi ulang.

Termasuk pula setiap kali ada pergantian tahun pajak baru, kami akan memindahkan data dari tahun pajak sebelumnya ke tahun pajak baru secara otomatis.

- k. Slip gaji elektronik 1 klik. Buat slip gaji elektronik secara otomatis begitu Anda selesai membuat laporan PPh 21. Hemat waktu dan kertas. Tinggal kirim file PDF slip gaji ke email karyawan-karyawan Anda dalam satu klik!
- l. Sistem payroll 1 klik. Bayar gaji karyawan dengan 1 klik, tanpa perlu hitung menggunakan macam-macam aplikasi dan input data berulang kali. Lebih mudah dan cepat!

Perhitungan PPh 21 di Online Pajak.

Perhitungan PPh 21 di OnlinePajak mudah, akurat, otomatis serta selalu diperbarui dengan peraturan pajak terbaru, termasuk PTKP 2016.

Hanya dengan 2 langkah, Anda bisa langsung mendapatkan laporan SPT Masa PPh 21 dan lampiran-lampirannya. Berikut ini adalah langkah mudah menghitung, setor dan e-Filing PPh 21 di Online Pajak:

1. Daftarkan perusahaan Anda di aplikasi PPh 21 OnlinePajak.
2. Lengkapi data gaji karyawanKlik menu ‘Karyawan’ dan lengkapi data-data berikut:
 - a. Isi data karyawan.
 - b. Pilih metode perhitungannya netto (bersih) atau gross up (kotor).
 - c. Pilih detil kontraknya yaitu status karyawannya tetap atau karyawan tidak tetap dan masa kerjanya.
 - d. Pilih detil BPJS karyawan, rumus perhitungan BPJS ini sudah dimasukan dalam aplikasi PPh 21, sehingga Anda tidak perlu repot-repot lagi menghitung bagian persentase yang harus dibayarkan karyawan dan perusahaan.
 - e. Lengkapi data gaji karyawan per bulan. Anda akan mendapatkan hasil perhitungan pajak baik per bulan maupun per tahun secara otomatis.
3. Dapatkan SPT Masa PPh 21. Buka menu “PPh 21” dan dapatkan SPT Masa PPh 21 dan lampiran-lampirannya secara otomatis.
4. Setor PPh 21 secara online. Klik “Bayar”, maka ID billing dan NTPN akan terisi otomatis.
5. Laporkan PPh 21 secara online. Klik “Lapor” untuk e-Filing PPh 21 secara gratis.

DAFTAR PUSTAKA.

- Adriani. 2014. Teori Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.
- Azhari, A Samudera. 2010. Perpajakan Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi, Hecca Publishing, Jakarta.
- B. Ilyas, Wirawan, dan Richard Burton. 2010. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 16/Pj/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/Pj/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-22/Pj/2009 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Ung Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Intansi Pemerintah. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan

- Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan / Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jakarta.
- PP Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu. Jakarta.
- PP Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus. Jakarta.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. Perpajakan Indonesia- Mekanisme dan Perhitungan , 2010, Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Sebagaimana Terakhir Telah Di Ubah Dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



